

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR TATA KARYA INDONESIA
TAHUN 2022**

**JL. JEMBATAN III RUKO 35 A-B
TELEPON: 021 6622017**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Tata Kelola perusahaan yang baik, merupakan landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan usaha yang semakin kompetitif, sehingga kepercayaan seluruh nasabah serta pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat. BPR Tata Karya Indonesia senantiasa berusaha untuk mengelola setiap risiko melalui pengawasan dan pengendalian internal yang efektif sebagai bagian dari pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola.

BPR Tata Karya Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan keyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan bank secara sehat dan berkesinambungan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh nasabahnya.

Sebagai lembaga intermediasi harus memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola dengan benar, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR TKI selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2022 dan untuk di tahun-tahun mendatang, BPR Tata Karya Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | | |
|---|---|---|--|
| 1. | Nama | : | Herty Djaelani |
| | Jabatan | : | Direktur Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| | <p>Direktur:</p> <p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p> | | |
| 2. | Nama | : | Lidianty Simbolon |
| | Jabatan | : | Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| | <p>Direktur Operasional:</p> <p>a. memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan</p> <p>b. menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam operasional perusahaan</p> <p>c. menyusun dan menetapkan berbagai strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan</p> <p>d. mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan operasional di perusahaan</p> <p>e. mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan</p> <p>f. menjadi perwakilan perusahaan yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan</p> <p>Direktur YMF Kepatuhan</p> <p>a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain</p> <p>b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan</p> <p>c. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain</p> <p>d. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan</p> <p>e. melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR</p> <p>f. melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.</p> | | |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : | | | |
| <p>a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko pada setiap kegiatan operasional dan bisnis.</p> <p>b. Tingkat Kesehatan Bank selalu diupayakan dalam posisi sehat.</p> <p>c. Monitor kepada debitor yang sudah dilaksanakan.</p> <p>d. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2022.</p> <p>e. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait</p> | | | |

| |
|--|
| pelaksanaan internal kontrol dalam melaksanakan tugas masing-masing. |
| Penjelasan Lebih Lanjut : |
| Nihil |

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris | | |
|---|--|---|-----------------|
| 1. | Nama | : | Feryanto Njomin |
| | Jabatan | : | Komisaris Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| | a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. | | |
| 2. | Nama | : | Hendra Nugraha |
| | Jabatan | : | Komisaris |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| | a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. | | |
| Rekomendasi Kepada Direksi : | | | |
| a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Memberikan mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Tata Karya Indonesia. d. Memonitor secara ketat kepada debitur agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2022. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. | | | |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| Nihil | | | |

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|-----|---------------------------------|
| 1. | Komite Audit |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| | Tidak ada |
| 2. | Komite Pemantau Risiko |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |

| | |
|---|--------------------------------|
| | Tidak ada |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| | Tidak ada |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite | |
| tidak memiliki komite | |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No. | Nama | Keahlian | Jabatan di Komite | Pihak Independen |
|--|------|----------|-------------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite | | | : | NIHIL |

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite | | | |
|-------------------------|--|---|---|--|
| 1. | Komite Audit | | | |
| | Program | : | - | |
| | Realisasi | : | - | |
| | Jumlah Rapat | : | - | |
| 2. | Komite Pemantau Risiko | | | |
| | Program | : | - | |
| | Realisasi | : | - | |
| | Jumlah Rapat | : | - | |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi | | | |
| | Program | : | - | |
| | Realisasi | : | - | |
| | Jumlah Rapat | : | - | |
| Penjelasan Lebih Lanjut | | | | |
| NIHIL | | | | |

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 1. | Herty Djaelani | Rp0,00 | 0% |
| 2. | Lidianty Simbolon | Rp0,00 | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |

Seluruh Anggota Direksi tidak terdapat kepemilikan saham.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Herty Djaelani | - | - | 0% |
| 2. | Lidianty Simbolon | - | - | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain. | | | | |

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Herty Djaelani | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Lidianty Simbolon | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham. | | | | |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Herty Djaelani | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Lidianty Simbolon | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| tidak terdapat hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham. | | | | |

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. | Feryanto Njomin | Rp5.600.000.000,00 | 40% |
| 2. | Hendra Nugraha | Rp0,00 | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| Komisaris Utama merupakan salah satu pemegang saham dengan jumlah saham yang dimiliki sebesar 40% atau setara dengan Rp 5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah). | | | |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Feryanto Njomin | - | - | 0% |
| 2. | Hendra Nugraha | - | - | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain. | | | | |

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | Feryanto Njomin | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Hendra Nugraha | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR | | | | |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | Feryanto Njomin | Tidak ada | Tidak ada | Lily Njomin - Ibu |
| 2. | Hendra Nugraha | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Komisaris Utama yang juga merupakan pemegang saham memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya. | | | | |

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji | 1 | Rp300.000.000,00 | 2 | Rp236.000.000,00 |
| 2. | Tunjangan | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| 3. | Tantiem | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| 4. | Kompensasi Berbasis Saham | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| 5. | Remunerasi Lainnya | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| Total | | | Rp300.000.000,00 | | Rp236.000.000,00 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | |
| Direksi dan Dewan Komisaris hanya memiliki remunerasi berupa gaji. | | | | | |

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1. | Perumahan | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Transportasi | Tidak ada | Tidak ada |
| 3. | Asuransi Kesehatan | Tidak ada | Tidak ada |
| 4. | Fasilitas Lainnya | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| tidak ada | | | |

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan | Perbandingan |
|--|--------------|
| | (a/b) : 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 3 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 2 : 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 3 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 3 : 1 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | |
| Gaji keseluruhan telah mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 tahun. | |

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|---|-------------------|----------------|---|
| 1. | 31 Maret 2022 | 2 | 1. Rencana Bisnis BPR TW I 2. Isu strategis BPR 3. Evaluasi kebijakan strategis dan/atau evaluasi Rencana Bisnis BPR 4. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada |
| 2. | 27 Juni 2022 | 2 | 1. Rencana Bisnis BPR TW II 2. Isu strategis BPR 3. Evaluasi kebijakan strategis dan/atau evaluasi Rencana Bisnis BPR 4. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada |
| 3. | 26 September 2022 | 2 | 1. Rencana Bisnis BPR TW III 2. Isu strategis BPR 3. Evaluasi kebijakan strategis dan/atau evaluasi Rencana Bisnis BPR 4. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada |
| 4. | 12 Desember 2022 | 2 | 1. Penetapan Rencana Bisnis BPR 2023 2. Evaluasi Rencana Bisnis BPR 2022 |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun : | | | |
| sampai dengan bulan Desember 2022, BPR telah melaksanakan 4 kali rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan. dengan agenda pembahasan tersebut di atas. | | | |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|---|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | Feryanto Njomin | 0 | 4 | 100% |
| 2. | Hendra Nugraha | 4 | 0 | 100% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Pelaksanaan rapat telah dilaksanakan dengan menggunakan media Zoom Meeting. | | | | |

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | | | | |
| NIHIL | | | | | | | | |

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|--|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai | 1 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
| Penjelasan Lebih Lanjut | | |
| Permasalahan hukum yang dihadapi oleh karena kelalaian debitur yang mengakibatkan pengambilan agunan, pada sidang pertama telah menerima putusan hakim dan selesai, namun debitur yang bersangkutan melakukan gugatan kembali dipersidangan. | | |

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Penerima Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|---------------------------|--|---------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | | | |
| NIHIL | | | | | | | |

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|---|----------------|
| 1. | 03 Desember 2022 | Sosial | Memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan uang tunai | Panti Asuhan ABBA dan Panti Asuhan Abimatha | Rp3.000.000,00 |
| 2. | 29 November 2022 | Sosial | pemberian dana kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam Cianjur melalui Perbarindo | Perbarindo | Rp1.000.000,00 |

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang kami adakan pada tahun 2022 yaitu memberikan bantuan kepada panti asuhan ABBA dan panti asuhan Abimatha.

Selain bantuan uang tunai, kami juga memberikan bantuan dalam bentuk sembako. Adapun sumbangan dalam bentuk sembako dan uang tunai, selain dari BPR tapi juga berasal dari donatur yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dan memberikan bantuan tunai kepada korban bencana alam Cianjur melalui Perbarindo.

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Nama BPR | : PT BPR Tata Karya Indonesia |
| Alamat | : JL. JEMBATAN III RUKO 35 A-B |
| Nomor Telepon | : 021 6622017 |
| Posisi Laporan | : Desember 2022 |
| Modal Inti | : Rp23.377.484.929,00 |
| Total Aset | : Rp75.009.435.737,00 |

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Tata Karya Indonesia Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No. | Faktor yang Dinilai | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 2.05 | 0.410 |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 2.00 | 0.300 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | 0.00 | 0.000 |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 2.00 | 0.200 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | 2.26 | 0.226 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 3.03 | 0.303 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 2.00 | 0.050 |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 2.17 | 0.217 |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 2.00 | 0.150 |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 2.00 | 0.150 |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 2.00 | 0.150 |
| Nilai Komposit | | | 2.200 |
| Predikat Komposit | | | Baik |

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.05)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah diupayakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan ditingkatkan lagi karena telah terpenuhinya susunan pengurus BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris telah dilakukan dengan baik melalui pemantauan yang dilakukan maupun memberikan arahan kepada Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menerapkan komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR Tata Karya Indonesia telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.26)

BPR Tata Karya Indonesia telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 3.03)

"PE Audit Intern di BPR Tata Karya Indonesia telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK), Namun pada bulan Oktober 2022 yang bersangkutan diangkat menjadi Direksi sehingga posisi PE Audit Intern terdapat kekosongan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

BPR Tata Karya Indonesia telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.17)

PT. BPR Tata Karya Indon telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK. Periode pelaporan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR Tata Karya Indonesia dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis Bank BPR Tata Karya Indonesia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Tata Karya Indonesia telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Tata Karya Indonesia juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa: faktor positif aspek struktur tata kelola ialah bank senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini. Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu sejak akhir Oktober tahun 2022 terdapat kekosongan jabatan pada posisi PE Audit intern.

Jakarta, 18 Januari 2023

PT BPR Tata Karya Indonesia